



**Pemerintah Kota Pontianak**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2024**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pontianak**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Al Mudabbir, Yang Maha Pengatur atas segala sesuatu. Atas perkenan-Nya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide, tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Juli 2023

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	2
1.3   Maksud dan Tujuan .....	6
1.4   Sistematika Penulisan .....	6
BAB II   HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	9
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	8
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan .....	23
2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	39
2.4   Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	42
2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	56
BAB III  TUJUAN DAN SASARAN .....	57
3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	57
3.2   Tujuan dan sasaran Renja .....	59
3.3   Program dan Kegiatan .....	61
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	62
BAB V   PENUTUP .....	72

## DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	14
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	24
TABEL 3.3	TARGET DAN INDIKATOR KINERJA.....	33
TABEL II.4	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	35
TABEL II.5	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 .....	43
TABEL IV.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

## **2.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- 17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
- 18) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
- 19) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
- 20) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
- 21) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 174).
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 23) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134).
- 24) Peraturan Wali Kota Nomor 53.9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.9).
- 25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
- 26) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor    Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak 2023 Nomor    ).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

## **BAB II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB III. Tujuan dan Sasaran**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

## **BAB V Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 telah terlaksana. Dan perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan/ atau realisasi APBD Tahun 2022 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Pada Tahun 2022 program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bahkan ada yang melebihi target kinerja dan ada yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana uraian berikut ini:

#### 1. Realisasi Program dan Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah 100% memenuhi persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan. Dengan penyerapan anggaran sebesar 95,73%.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja ini adalah berkat kemampuan SDM dalam menyiapkan dokumen dan laporan.

Sehingga memberikan implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik, terselenggaranya

administrasi umum perangkat daerah yang baik, terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Implikasi lainnya yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah mampu menopang kebutuhan kesekretariatan.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengoptimalkan faktor-faktor pendukung tersebut adalah menambah pagu anggaran yang ditetapkan. Khususnya pada sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya harus sama dengan jumlah ASN dan Non ASN yang ada pada tahun berjalan dan sesuai dengan jumlah pakaian dinas yang diwajibkan.

Pada lima tahun sebelumnya yang dianggarkan hanya pakaian ASN sebanyak 2 stel, namun tidak mengakomodir pakaian Non ASN. Setelah masuk masa pandemi, terjadi refocusing dana yang masih mendapatkan dampaknya sehingga penganggaran Tahun 2023 semakin berkurang menjadi 1 stel saja. Semua ASN hanya mengoptimalkan baju yang sudah dipakai sebelumnya hingga terjadi penurunan kelayakan bahan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hak yang harus di dapatkan ASN dan Non ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Belum lagi ketika pelaksanaan hari jadi Kota Pontianak, ASN dan Non ASN dilibatkan dalam perayaan tersebut dengan pakaian adat khas daerah serta penyelenggaraan kegiatan insidental lainnya yang memerlukan pengadaan pakaian sebagai simbol pelayanan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil lainnya adalah pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Mengingat kompetensi ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, maka masih sangat diperlukan terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Baik dari tataran pengambilan kebijakan, penguasaan bidang

teknis hingga *soft skill* yang sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Program pengelolaan profil kependudukan

Realisasi program pengelolaan profil kependudukan telah memenuhi 100% dari target persentase penyusunan profil kependudukan. Dengan penyerapan anggaran sebesar 100% pula.

Hal ini didukung oleh faktor terbukanya akses pengelolaan data kependudukan dengan pemerintah pusat. Meski ada keterbatasan pada beberapa kategori, namun data yang diperlukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum, sudah terpenuhi dengan baik.

Sehingga memberikan implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain tersusunnya profil kependudukan Kota Pontianak. Begitu pula berdampak pada tersedianya data agregat kependudukan Kota Pontianak dan tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan, serta data-data untuk kebutuhan yang lainnya.

Maka perlu mempertahankan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang ada, sembari memikirkan optimalisasi agar tidak mengalami kemunduran atau tidak mencapai target kinerja.

**2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran**

a. Program Pendaftaran Penduduk

Realisasi program pendaftaran penduduk melebihi target adalah pada indikator persentase penyelesaian penerbitan kartu keluarga dengan realisasi sebesar 111,37 persen. Begitu juga pada persentase penyelesaian penerbitan KTP berhasil terrealisasi mencapai 123,51 persen. Selain itu, persentase penyelesaian surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen pun berhasil mencapai realisasi 102,4 persen. Dan semua pencapaian yang melebihi target tersebut telah mengoptimalkan anggaran sebesar 98,38 persen.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan diatas bahkan melebihi target yang ditetapkan adalah dikarenakan adanya kemudahan persyaratan yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri sehingga memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi berkas permohonan, adanya pelayanan jemput bola perekaman KTP serta berusaha memenuhi ketersediaan blanko KTP dengan selalu mengajukan permohonan Ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pelayanan penerbitan surat tanda bukti pendataan penduduk permanen pun jika dilengkapi persyaratan yang akurat dapat terselesaikan tepat waktu.

b. Program Pencatatan Sipil

Realisasi program pencatatan sipil telah melebihi target kinerja hasil/keluaran pada lima indikator: Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan sebesar 219,62 persen. Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan sebesar 181,42 persen. Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai sebesar 124,80 persen, Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status sebesar 284,97 persen dan Persentase Penduduk yang meninggal dan menerima Akta Kematian sebesar 283,20 persen.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi bisa melebihi target yang telah ditentukan yaitu:

- Pelayanan dilakukan di rumah sakit/bidan praktek, selain itu juga adanya pelayanan keliling di kelurahan-kelurahan.
- Pentingnya dokumen akte perkawinan untuk kepentingan tertentu sehingga masyarakat melakukan pengurusannya tepat waktu.
- Pentingnya dokumen akte cerai untuk kepentingan tertentu sehingga masyarakat melakukan pengurusannya tepat waktu.
- Pentingnya dokumen perubahan status (akte kelahiran) untuk kepentingan tertentu.

- Pentingnya dokumen akte kematian untuk kepentingan tertentu serta kemudahan persyaratan untuk pengurusan dokumen akte kematian

Adapun secara umum faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa terbuka dengan kritik dan saran masyarakat pengguna layanan ;
- b. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima.

Dengan demikian memberi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 berupa keberhasilan diluar espektasi sehingga bisa mendukung peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) perangkat daerah penyedia layanan. Pada tahun 2022, IPP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mendapatkan nilai A- (Sangat Baik). Maka diharapkan pada periode penilaian selanjutnya mendapatkan nilai A sebagai pelaksana pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang telah diambil oleh pimpinan akan dipertahankan dan akan diupayakan bisa mewujudkan inovasi pelayanan yang berbasis kepuasan masyarakat.

### **3. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, targetnya ada 56 ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya, namun terrealisasi 52 orang saja, sehingga realisasi hanya mencapai 92,86 persen. Meskipun anggaran terrealisasi sudah 100%.

Faktor yang menyebabkan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah penyesuaian dengan jumlah ASN yang ada pada tahun berjalan. Sementara dinamika ASN bisa terjadi dikarenakan adanya yang pensiun, mutasi, promosi dan lain-lain.

Realisasi subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yakni belanja paket pengiriman tidak dapat direalisasikan secara maksimal yaitu sebesar 77.27 %. Belanja tersebut dipergunakan untuk biaya pengiriman blanko KTP EI dari Jakarta. Untuk jumlah blanko yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil jumlahnya tidak selalu sesuai kebutuhan karena menyesuaikan jumlah permintaan se-Indonesia. Sehingga untuk biaya pengirimannya tergantung dengan berat blanko KTP EI dan jarak yang ditempuh serta volume kiriman yang di dapat.

Selain itu pada November tahun 2022 ketersediaan blanko di Ditjen Dukcapil juga mengalami kekosongan (berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil No.471.13/17740/Dukcapil tanggal 18 November 2022) sehingga tidak ada distribusi blanko KTP di daerah-daerah. Permasalahan ini telah dicoba untuk diatasi dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lainnya agar dapat diberikan penambahan blanko sesuai kebutuhan. Juga diarahkan optimalisasi penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus mengalami upaya efisiensi penggunaan belanja telpon. Sehingga dilakukan evaluasi kebutuhan telepon setiap bulan sehingga jika terdapat kelebihan anggaran dapat dilakukan ke kegiatan lain.

Untuk optimalisasi semua pelayanan di kantor, maka dilakukan evaluasi penyerapan realisasi anggaran secara berkala sehingga anggaran yang tidak efektif dapat dilakukan pergeseran ke kegiatan lain.

#### b. Program Pendaftaran Penduduk

Persentase penyelesaian penerbitan KIA pada program pendaftaran penduduk juga belum mengalami peningkatan. Karena adanya keterbatasan SDM dan sarana untuk melakukan pencetakan KIA. Sehingga masih memerlukan evaluasi terhadap target kinerja.

Sedangkan realisasi program/ kegiatan /subkegiatan yang masih 0 (nol) dikarenakan penyusunan renja 2024 merupakan tahun pertama pada periodisasi renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023**  
**Kota Pontianak**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95 Persen					95 Persen	100	1,052631579
2.12.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen					100 Persen	100	1
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen					5 Dokumen	10	2
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	40	20,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan					5 Laporan	11	2,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan					5 Laporan	8	1,60
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100</b> Persen	<b>100</b>	<b>1</b>
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan					55 Orang/Bulan	67	1,22
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen					12 Dokumen	24	2,00
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan					6 Laporan	10	1,67
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100</b> Persen	<b>100</b>	<b>1</b>
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket					55 Paket	106	1,93
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang					2 Orang	3	1,50
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang					0 Orang	0	#DIV/0!
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100</b> Persen	<b>200</b>	<b>2</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket					2 Paket	14	7
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					4 Paket	1504	376
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket					12 Paket	24	2
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	13	13
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen					0 Dokumen	12	#DIV/0!
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan	24	2
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERA</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit					0 Unit	0	#DIV/0!
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13 Unit					13 Unit	43	3,31
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan					12 Laporan	24	2
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	24	2
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	24	2
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit					3 Unit	6	2
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit					30 Unit	60	2
<b>02.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>							0		
		<b>Persentase penyelesaian penerbitan KIA</b>	<b>87 Persen</b>	<b>38,28</b>				<b>87 Persen</b>	<b>38,28</b>	<b>0,44</b>
		<b>Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga</b>	<b>90 Persen</b>	<b>99,12</b>				<b>90 Persen</b>	<b>99,12</b>	<b>1,10</b>
		<b>Presentase penyelesaian surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen</b>	<b>99 Persen</b>	<b>100</b>				<b>99 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1,01</b>
		<b>Presentase penyelesaian penerbitan KTP</b>	<b>82 Persen</b>	<b>100,04</b>				<b>82 Persen</b>	<b>100,04</b>	<b>1,22</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.02.2.01	<b>PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase pelayanan pendaftaran penduduk</b>	100 %					100 %	144,77	1,45
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665 Dokumen					665 Dokumen	940	1,41
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56 Laporan					56 Laporan	436	7,79
2.12.02.2.01.0005	<i>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500 Dokumen					12500 Dokumen	0	0
2.12.02.2.02	<b>PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	0 Persen					100 Persen	100,00	#DIV/0!
2.12.02.2.02.0002	<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Dokumen					0 Dokumen	0	#DIV/0!
2.12.02.2.03	<b>PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100 %					100 %	100,00	1
2.12.02.2.03.0002	<i>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	90 Dokumen					90 Dokumen	90	1
02.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status</b>	40 Persen	99,74				40 Persen	99,74	2,49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	55 Persen	98,83				55 Persen	98,83	1,80
		Persentase penerbitan akte kematian	40 Persen	99,12				40 Persen	99,12	2,48
		Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)	40 Persen	43,68				40 Persen	43,68	1,09
		Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	60 Persen	99,78				60 Persen	99,78	1,66
<b>02.12.03.2.01</b>	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000 Dokumen					11.000 Dokumen	11830	1,08
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16 Layanan					16 Layanan	10016	626,00
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>
2.12.03.2.02.0001	<i>Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota	0 Laporan					0 Laporan	0	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan				1 Laporan	4	4,00	
2.12.03.2.02.0004	<i>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	35 Laporan				35 Laporan	35	1,00	
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>				<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	
2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2 Laporan				2 Laporan	5544	2772,00	
2.12.03.2.03.0004	<i>Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan				0 Laporan	0	#DIV/0!	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan</b>	<b>85 Persen</b>	<b>100</b>				<b>85 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1,176470588</b>
2.12.04.2.01	<b>PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen					1 Dokumen	11	11,00
02.12.04.2.03	<b>PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>
02.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan					4 Laporan	40	10,00
02.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen					2 Dokumen	14	7,00
02.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>				<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
2.12.05.2.01	<b>PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100 Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Dokumen	36	36,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen					1 Dokumen	66	66,00

Sumber: Renstra Tahun 2024-2026

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
- b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA
- c. Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- d. Presentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- e. Presentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
- g. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian
- h. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

- i. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- j. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
- k. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- l. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Pontianak Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
				(%)	(%)	(%)	
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	96,50			
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91,50			
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	27,50			
			Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98,50			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	93,50		
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	57,50			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	37,50		
			Persentase Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian	37,50		
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	37,50		
		Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	62,5		
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00		
		Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik		

Sumber: Renstra Perubahan Kedua Disdukcapil Kota Pontianak Tahun 2020-2024

#### a. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan lengkap, berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam

peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Pada tahun sebelumnya hingga 14 hari namun dikarenakan adanya inovasi PACRI (Pelayanan Cetak Sehari) mulai 3 Juni 2022 maka dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan lengkap.

Persentase keluarga yang memiliki KK adalah jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 96 %. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

#### **b. Persentase Penduduk yang memiliki KTP**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2022, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 91 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan dengan baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

**c. Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA**

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada tahun 2022, persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA tercatat memiliki capaian sebesar 25%.

Melebihi target nasional sebesar 22,50%, Dinas Kependudukan Kota Pontianak telah mencapai target nasional.

**d. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen**

Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah tetap, biasanya dilakukan untuk oleh mahasiswa yang sedang belajar di tempat tertentu, dan penduduk yang bekerja.

Setiap penduduk non permanen wajib memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dulu disebut dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di wilayah setempat.

Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi. Setiap penduduk non permanen wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk non permanen wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu 2 x 24 jam sejak kepindahannya kepada kelurahan setempat melalui RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.

Indikator persentase penduduk non permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen di rumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dibagi jumlah pemohon penduduk non permanen. Untuk tahun 2022, realisasi pencapaiannya adalah 98%.

#### **e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran**

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Tahun 2022, persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang mencapai 93%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan**

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan

dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.

Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatatn secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara matetial dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yangn memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Untuk tahun 2021, Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan mencapai 55%.

#### **g. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai**

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan dan tidak tercatat, Pada tahun 2022 untuk realisasi kinerja adalah 35%.

#### **h. Persentase anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status**

Pengajuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antar ayah kandung dengan ibu kandung.

Sedangkan pengesahan anak merupakan pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, diluar ikatan perkawinan yang sah, diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status dirumuskan yaitu jumlah anak yang mengalami perubahan status dibagi jumlah anak yang berstatus anak seorang ibu. Untuk Tahun 2022 capaiannya adalah sebesar 35%.

#### **i. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian**

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian.

Tahun 2022, Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian terealisasi sebesar 35%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

**j. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data**

Pemanfaatan data kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan dan atau penegakan hukum.

Proses pemberian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Ijin sebagaimana dimaksud sebagai syarat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna.

Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data di rumuskan yaitu jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data dibagi jumlah instansi pelayanan publik di Kota Pontianak. Untuk Tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 16 Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dan artinya jumlah capainya adalah sebesar 60%.

#### k. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk Kepentingan Pembangunan

Tingkat keakurasian data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan khususnya dari kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akurat dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akurat merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembanguan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan berskala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan dibagi jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk tahun 2022 telah dicapai.

Untuk target indikator pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target dan Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**  
**Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	99,00

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	95,00
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	60,00
4	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	98,00
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60,00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	40,00
7	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	97,00
8	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2024-2026

Analisis kinerja pelayanan dari tahun (n-2) , tahun(n-1), tahun n, tahun (n+1) dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	<b>SASARAN</b>											
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	-	-	95,50	96,00	98,00	99,00	96,00	-	98,00	98,50	
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	-	-	90,50	91,00	94,00	95,00	91,00	-	94,00	94,50	
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	-	-	22,50	25,00	50,00	60,00	25,00	-	50,00	50,50	
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	-	-	97,50	98,00	98,50	99,00	98,00	-	98,50	99,00	
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	-	-	92,50	93,00	97,00	98,00	93,00	-	97,00	97,50	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	-	-	52,50	55,00	57,50	60,00	55,00	-	57,50	58,00	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	-	-	32,50	35,00	37,50	40,00	35,00	-	37,50	38,00	
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	-	-	32,50	35,00	37,50	40,00	35,00	-	37,50	38,00	
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	-	-	32,50	35,00	95,00	97,00	35,00	-	95,00	95,50	
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	-	-	57,50	60,00	62,50	65,00	60,00	-	62,50	63,00	
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	
<b>PROGRAM</b>												
1	Presentase penyelesaian surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen		-	98,00	98,50	99,00	99,25	100,00	0,00	99,00	99,25	
2	Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga		-	89,00	89,50	90,00	95,00	99,12	0,00	90,00	95,00	
3	Persentase penyelesaian penerbitan KIA		-	86,00	86,50	87,00	87,50	38,28	0,00	87,00	87,50	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
4	Presentase penyelesaian penerbitan KTP		-	81,00	81,50	82,00	82,50	100,04	0,00	82,00	82,50	
5	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status		-	35,00	37,50	40,00	42,50	99,74	0,00	40,00	42,50	
6	Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran		-	45,00	47,50	55,00	60,00	98,83	0,00	55,00	60,00	
7	Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)		-	35,00	37,50	40,00	42,50	43,68	0,00	40,00	42,50	
8	Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)		-	55,00	57,50	60,00	62,50	99,78	0,00	60,00	62,50	
9	Persentase penerbitan akte kematian		-	35,00	37,50	40,00	42,50	99,12	0,00	40,00	42,50	
10	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan		-	80,00	82,50	85,00	85,00	44,83	0,00	85,00	85,00	
11	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
12	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,50	
	<b>IKK</b>											

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Perekaman KTP Elektronik		√	100,00	100,00	100,00	100,00	96,31	-	99,00	99,00	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		√	100,00	100,00	100,00	100,00	48,02	-	50,00	55,00	
3	Kepemilikan Akta Kelahiran		√	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	-	99,98	99,98	
4	Penerbitan Akta Perkawinan		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
5	Penerbitan Akta Perceraian	-	√	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
6	Penerbitan Akta Kematian	-	√	100,00	100,00	100,00	100,00	99,15	-	99,30	99,50	
7	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	√	100,00	100,00	100,00	100,00	76,19	-	80,00	82,00	
8	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	

Sumber: Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022 dan LPPD Tahun 2022

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **2.3.1. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Digital ID)**

Digital ID ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Mulai Bulan Juli Tahun 2022, penerapan Digital ID masih diujicobakan pada internal Aparatur Sipil Negara Disdukcapil di tiap daerah, secara bertahap akan diterapkan pada seluruh penduduk. Tercatat sampai dengan 14 April 2023, ada 3098 pemilik IKD di Kota Pontianak.

#### **2.3.2. Peralihan Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi**

Berdasarkan Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah mencetak 204.053 kartu keluarga. Namun disinyalir masih ada penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

#### **2.3.3. Penerapan Kertas pada Dokumen Kependudukan**

Berdasarkan Permendagri nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, maka sejak 1 Juli 2020 seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan kertas HVS 80 gr ukuran A4 warna putih. Namun masyarakat masih terbiasa dengan Kartu Keluarga model lama dan belum terbiasa mengakses *email* dimana *file* dokumen tersebut bisa pula dicetak secara mandiri, bahkan dengan kertas biasa. Hal ini menjadikan pegawai yang memberikan pelayanan harus berupaya lebih untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan kurang ramah lingkungan jika tidak sebisa mungkin menerapkan *paperless* dalam administrasi kependudukan.

#### **2.3.4. Dukungan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024**

Pada tahun 2022, data kependudukan Indonesia berjumlah 275 juta jiwa. Sementara yang masuk ke dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 204,6 juta jiwa. Maka Pada 22 Desember 2022 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sehingga KPU kabupaten/kota yang tak bisa lagi meminta data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) ke Dinas Dukcapil daerah. Kerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali.

Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai wali data dari satu data kependudukan Indonesia. Maka dengan adanya PKS ini maka terwujud upaya Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam mendukung penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang sudah direncanakan digelar pada tahun 2024. Dinas Dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota ditugaskan untuk bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP-el, khususnya calon pemilih.

Sementara itu, SDM yang dilibatkan dalam optimalisasi perekaman data tersebut terkadang menggunakan waktu diluar jam kantor dan tanpa mendapatkan kompensasi berupa insentif atau belanja makan minum. Belum lagi resiko mencarikan solusi terkait dokumen kependudukan pemilih yang berdomisili di perbatasan antar kota/kabupaten dan mengalami polemik politik terkait daerah pemilihan (dapil).

#### **2.3.5. Pembatasan Pengelolaan Data di Daerah**

Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan mulai tahun 2020 sehingga daerah wajib menerapkan SIAK Terpusat. Untuk Kota Pontianak mulai menerapkan SIAK Terpusat ini sejak 20 september 2021.

Sehingga berdampak pada penyajian data kependudukan yang tidak dapat diolah secara lengkap karena semua tabel data kependudukan hanya

bisa disajikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (data agregat) setiap semesternya dan tidak dapat diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pun memiliki peluang (*Opportunities*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.
4. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
5. Adanya komitmen untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan.

Tantangan (*Threats*) merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi perangkat daerah yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi perangkat daerah dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
3. Lemahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dokumen kependudukan.
4. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar dan dalam daerah.
5. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga mengganggu perekaman, pengiriman data hasil perekaman, verifikasi, validasi data dan pencetakan dokumen.
6. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik yang bersumber dari APBN Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Maka rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi sekaligus komunikasi dengan warga Kota Pontianak.
2. Terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
3. Perlu adanya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menyalahgunakan dokumen kependudukan.
4. Adanya kebijakan untuk kemudahan perpindahan penduduk antar kota/kabupaten dan propinsi.
5. Disokongnya perangkat keras dan lunak untuk operasional pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
6. Peningkatan ketersediaan blangko KTP Elektronik agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dan lain-lain.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD sudah memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak di Tahun 2024. Hanya saja diharapkan agar ada peningkatan besaran pagu anggaran untuk program dan kegiatan yang menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan terjadinya lonjakan layanan khususnya pada masa awal tahun pendidikan dan persiapan Pemilu.

Program-program yang mendukung Rencana Kerja 2024 dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Pontianak**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	
-1	-2	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	Persen	10.595.585.780,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	Persen	10.595.585.780,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	30.722.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	30.722.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	8.201.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	8.201.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Laporan	1.653.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Laporan	1.653.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	16.108.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	16.108.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	4.760.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.760.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	7.172.613.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	7.172.613.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	6.940.920.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	6.940.920.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	228.240.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	228.240.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	3.453.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	3.453.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>47.995.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>47.995.000,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	35.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	35.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	12.495.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	12.495.000,00	
	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	1.321.827.180,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	1.321.827.180,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.873.875,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.873.875,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.191.076.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.191.076.700,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.880.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.880.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	dokumen	0,00				0	dokumen	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	54.996.605,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	54.996.605,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>462.266.100,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>462.266.100,00</b>	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	Unit	0,00				0	Unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	Unit	462.266.100,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	462.266.100,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.444.341.600,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.444.341.600,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	26.900.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	26.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	30.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	30.400.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.387.041.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.387.041.600,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>115.820.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>115.820.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	76.650.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3	Unit	76.650.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	39.170.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	unit	39.170.000,00	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Pontianak					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	Pontianak					

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	87	%	91.459.200,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pontianak	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	87	%	91.459.200,00	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	90	%				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	90	%		
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	99	%				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	99	%		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	82	%			Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	82	%			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	51.104.200,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	51.104.200,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen	12.935.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen	12.935.000,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan	35.184.200,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan	35.184.200,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	12500	Dokumen	2.985.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500	Dokumen	2.985.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)	
		Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>40.355.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>40.355.000,00</b>		
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	90	Dokumen	40.355.000,00	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	90	Dokumen	40.355.000,00		
3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>233.042.400,00</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>233.042.400,00</b>		
		<b>Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran</b>	<b>55</b>	<b>%</b>				<b>Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan</b>	<b>55</b>	<b>%</b>			
		<b>Persentase penerbitan akte kematian</b>	<b>40</b>	<b>%</b>				<b>Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan</b>	<b>40</b>	<b>%</b>			
		<b>Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim)</b>	<b>40</b>	<b>%</b>				<b>Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan</b>	<b>40</b>	<b>%</b>			

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
		Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	60	%				Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	60	%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	128.788.900,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	128.788.900,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen	12.203.900,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen	12.203.900,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan	116.585.000,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan	116.585.000,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	75.219.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	75.219.000,00	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan	34.864.000,00	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan	34.864.000,00	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran	35	Laporan	40.355.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	35	Laporan	40.355.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
	Penting terkait Pencatatan Sipil	Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				Penting terkait Pencatatan Sipil		Penting Terkait Pencatatan Sipil				
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	100	%	29.034.500,00	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	100	%	29.034.500,00	



No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	85	%	232.140.020,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	85	%	232.140.020,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	%	89.723.080,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pontianak	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	%	89.723.080,00	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	89.723.080,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	89.723.080,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	142.416.940,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	142.416.940,00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	87.984.940,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	87.984.940,00	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Laporan	54.432.000,00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Laporan	54.432.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.000)
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</b>	100	%	16.944.600,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Pontianak	<b>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</b>	100	%	16.944.600,00	
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>	100	%	16.944.600,00	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Pontianak	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>	100	%	16.944.600,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.136.600,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.136.600,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	Dokumen	14.808.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	Dokumen	14.808.000,00	
					<b>11.169.172.000,00</b>						<b>11.169.172.000,00</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akte kelahiran dan akte kematian serta semua pengurusan dokumen lainnya terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, akte kelahiran, akte kematian serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, pelayanan ditempat-tempat tertentu misalnya *Car free Day* serta kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik dengan diberlakukannya pendaftaran pengurusan secara *online*.

Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tidak langsung mengakomodir** usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik
4. Bidang Pencatatan Sipil “Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Beberapa Kebijakan Nasional :

##### a) SIAK TERPUSAT

SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat.

Isu digitalisasi pada sistem dukcapil ini terus bertransformasi. Dimulai sejak 1995 dengan nama Sistem Manajemen Informasi Kependudukan (SIMDUK), lalu berubah pada 2000 menjadi Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP), dan terakhir pada 2022 berubah nomenklatur menjadi SIAK Terpusat.

Pemerintah Kota Pontianak turut menjadi daerah yang menyelenggarakan SIAK Terpusat. Dengan tujuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi mewujudkan pelayanan kependudukan yang lebih cepat dan berkualitas. Diantara 514 dinas Dukcapil yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Kota Pontianak salah satu yang telah bermigrasi pada SIAK terpusat dengan baik, tanpa menghentikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Pada Tahun 2022, Ditjen Dukcapil Kemendagri mempercepat proses migrasi data ini dari SIAK terdistribusi menuju SIAK terpusat tersebut. Konsentrasi SIAK terpusat ini salah satunya menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan jadwal bagi Kemendagri untuk menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada 14 Oktober 2022 atau 16 bulan sebelum pencoblosan. Hal ini sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai tahun ini.

#### **b) IDENTITAS DIGITAL (DIGITAL ID)**

Digital-ID merupakan petunjuk identitas berbentuk digital yang diberikan kepada seseorang setelah diidentifikasi dan diverifikasi secara fisik oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Isu Digital ID ini muncul dari hasil kajian aktual Penerapan Digital-ID dalam Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri pada 2021. Isu ini mendapat antusiasme masyarakat. Meski masih ada problem perlunya menyiapkan serangkaian upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Meningkatkan literasi digital, terutama untuk masyarakat perdesaan dan 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan lembaga non-profit.

Pemerintah Kota Pontianak siap turut melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait Digital ID. Di daerah berpeluang membuat grup-grup fasilitator untuk menjangkau masyarakat di tingkat bawah. Bersamaan hal tersebut, Kemendagri mulai memetakan

peluang, potensi, dan beragam hal yang perlu diperhatikan untuk penerapan digital-ID.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### A. Tujuan dan Sasaran

##### 1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

**Tujuan : “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik”**

##### 2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran

strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.
- c. Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

- a. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
- b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA
- c. Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- d. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
- e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian
- f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- g. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- h. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Pendaftaran Penduduk**
3. **Program Pencatatan Sipil**
4. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**
5. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam menopang salah satu sasaran dari pemerintah daerah yaitu ***Meningkatnya Kualitas Layanan Publik***. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kota Pontianak dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan di tahun 2024, berikut kami sajikan tabel IV.1 terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju dapat dilihat berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.169.172.000,00				10.940.949.000,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.169.172.000,00				10.940.949.000,00			
2	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.169.172.000,00				10.940.949.000,00			
2	1 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10.595.585.780,00				10.306.057.720,00		
2	1 2	0 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							30.722.900,00				30.722.900,00	
2	1 2	0 1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	5 Dokumen	100 %	8.201.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.201.900,00
2	1 2	0 1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	2 Dokumen	100 %	1.653.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.653.000,00
2	1 2	0 1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	5 Laporan	100 %	16.108.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16.108.000,00
2	1 2	0 1	2.0	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	5 Laporan	100 %	4.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.760.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	1	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7.172.613.000,00				6.753.477.000,00		
2	1	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	55 Orang/bulan	100 %	6.940.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.521.784.000,00						
2	1	0	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Dokumen	100 %	228.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	228.240.000,00						
2	1	0	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	6 Laporan	100 %	3.453.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	3.453.000,00						
2	1	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	47.995.000,00
2	1	0	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan 1) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	95 % 92 ; 81 Nilai (Predikat)	1 Paket	100 %	35.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.500.000,00						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		oleh Inspektorat; 2) Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat														
2	1 2	0 1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan 1) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat; 2) Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	95 % 92 ; 81 Nilai (Predikat)	2 Orang	100 %	12.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.495.000,00
2	1 2	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.321.827.180,00				1.421.827.180,00	
2	1 2	0 1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	2 Paket	100 %	11.873.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.873.875,00
2	1 2	0 1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	3 Paket	100 %	1.191.076.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.291.076.700,00
2	1 2	0 1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Paket	100 %	39.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.880.000,00
2	1 2	0 1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	1 Paket	100 %	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,00
2	1 2	0 1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak	100 %	12 Laporan	100 %	54.996.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	54.996.605,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Selatan, Parittokaya								Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2	1 2	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						462.266.100,00				462.266.100,00	
2	1 2	0 1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Unit	100 %	462.266.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	462.266.100,00
2	1 2	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.444.341.600,00				1.473.949.540,00	
2	1 2	0 1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Laporan	100 %	26.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.900.000,00
2	1 2	0 1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Laporan	100 %	30.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.400.000,00
2	1 2	0 1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	12 Laporan	100 %	1.387.041.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.416.649.540,00
2	1 2	0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.820.000,00				115.820.000,00	
2	1 2	0 1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	3 Unit	100 %	76.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	76.650.000,00
2	1 2	0 1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 %	30 Unit	100 %	39.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	39.170.000,00		
2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				91.459.200,00					116.104.200,00		
2	1 2	0 2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				51.104.200,00					51.104.200,00		
2	1 2	0 2	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
					Persentase penyelesaian penerbitan KIA Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga Presentase penyelesaian suarat tanda bukti pendataan penduduk non permanen presentase penyelesaian penerbitan KTP	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	87 Persen 90 Persen 99 Persen 82 Persen	665 Dokumen	100 %	12.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665 Dokumen	12.935.000,00
2	1 2	0 2	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
					Persentase penyelesaian penerbitan KIA Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga Presentase penyelesaian suarat tanda bukti pendataan penduduk non permanen presentase penyelesaian penerbitan KTP	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	87 Persen 90 Persen 99 Persen 82 Persen	56 Laporan	100 %	35.184.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56 Laporan	35.184.200,00
2	1 2	0 2	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
					Persentase penyelesaian penerbitan KIA Presentase penyelesaian penertiban kartu keluarga Presentase penyelesaian suarat tanda bukti pendataan penduduk non permanen presentase penyelesaian penerbitan KTP	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	87 Persen 90 Persen 99 Persen 82 Persen	12500 Dokumen	100 %	2.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500 Dokumen	2.985.000,00
2	1 2	0 2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				40.355.000,00					65.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2 2	0 2	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk												
				Persentase penyelesaian penerbitan KIA Persentase penyelesaian penertiban kartu keluarga Persentase penyelesaian surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen persentase penyelesaian penerbitan KTP	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	87 Persen 90 Persen 99 Persen 82 Persen	90 Dokumen	100 %	40.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	90 Dokumen	65.000.000,00	
2 2	1 2	0 3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					233.042.400,00					257.687.400,00		
2 2	1 2	0 3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					128.788.900,00					128.788.900,00		
2 2	1 2	0 3	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
					Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim) Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	40 Persen 55 Persen 40 Persen 40 Persen 60 Persen	11000 Dokumen	100 %	12.203.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000 Dokumen	12.203.900,00
2 2	1 2	0 3	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil											
					Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim) Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	40 Persen 55 Persen 40 Persen 40 Persen 60 Persen	16 Layanan	100 %	116.585.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16 Layanan	116.585.000,00
2 2	1 2	0 3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					75.219.000,00					99.864.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	1	0	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil															
					Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim) Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	40 Persen 55 Persen 40 Persen 40 Persen 60 Persen	1 Laporan	100 %	34.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	34.864.000,00				
2	1	0	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil															
					Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim) Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	40 Persen 55 Persen 40 Persen 40 Persen 60 Persen	35 Laporan	100 %	40.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	35 Laporan	65.000.000,00				
2	1	0	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil															29.034.500,00
2	1	0	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil															
					Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akata kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian (non muslim) Persentase penerbitan akte perkawinan (non muslim)	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	40 Persen 55 Persen 40 Persen 40 Persen 60 Persen	2 Laporan	100 %	29.034.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2 Laporan	29.034.500,00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 2 4									232.140.020,00				244.155.080,00		
2 2 4		2.01							89.723.080,00				89.723.080,00		
2 2 4		2.01	0002												
				Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	85 Persen	1 Dokumen	100 %	89.723.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	89.723.080,00
2 2 4		2.03							142.416.940,00				154.432.000,00		
2 2 4		2.03	0003												
				Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	85 Persen	4 Laporan	100 %	87.984.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	100.000.000,00
2 2 4		2.03	0007												
				Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	85 Persen	2 Laporan	100 %	54.432.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	54.432.000,00
2 2 5									16.944.600,00				16.944.600,00		
2 2 5		2.01							16.944.600,00				16.944.600,00		
2 2 5		2.01	0001												
				Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 Persen	1 Dokumen	100 %	2.136.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.136.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
					Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	100 Persen	1 Dokumen	100 %	14.808.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	14.808.000,00		
<b>TOTAL</b>											<b>11.169.172.000,00</b>			<b>10.940.949.000,00</b>				

Sumber: SIPD, Tahun 2023

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja khususnya *outcomes* dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (*outcomes*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat diukur capaian kerjanya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP el) tahun 2023 yang telah terlaksana dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan untuk

mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el dan dokumen pencatatan sipil di Kota Pontianak yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran 2024 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan.

Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatnya tertib administrasi Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standar nasional; kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Data Base Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pontianak, Juli 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pontianak

**ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671101 198803 2 004